1. Pendahuluan

Pada tahun 2017, 143 juta dari 262 juta rakyat Indonesia telah terkoneksi dengan internet. Diantara 143 juta tersebut, 87.13% telah dapat mengakses sosial media dan menjadikannya sebuah gaya hidup[1]. Sosial media sendiri adalah salah satu medium yang efektif dalam menyebarkan informasi secara luas. Twitter sebagai salah satu sosial media terbesar di Indonesia, memiliki jumlah pengguna indonesia sebanyak 29.4 juta pada tahun 2012[2]. Sektor *trending topic* pada Twitter merupakan salah satu akses pengguna Twitter dalam mencari tahu informasi tentang apa saja kejadian kejadian yang sedang terjadi di sekitar kita[3]. Namun belakangan ini, sektor *trending topic* pada Twitter dipenuhi oleh hashtag hashtag yang tidak relevan dan juga sering kali hashtag tersebut berisi informasi yang tidak benar. Hal tersebut dikarenakan hashtag hashtag tersebut berasal dari buzzer.

Di Indonesia sendiri, efek dari buzzer telah dirasakan pada event pemilihan gubernur Jakarta di tahun 2012[1]. Sejak saat itu, fenomena buzzer di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Puncaknya bisa dibilang terjadi pada pemilihan presiden pada tahun 2019[4]. Buzzer dipakai oleh politisi untuk menyerang lawan politiknya dengan cara menyebarkan informasi palsu dan menyebarkan informasi pribadi lawan politiknya [5][1]. Efek dari buzzer di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat buruk hingga dapat memecah belah masyarakat [6].

Penelitian yang dilakukan oleh [7] menunjukkan bahwa peran buzzer di media sosial dalam kegiatan Pemilu dan Pilkada telah mencapai tahap yang parah. Hal ini dapat terlihat dari gencarnya aktivitas *black campaign* pada Pilkada Jakarta tahun 2017 dan Pilkada Sumatera Utara tahun 2018. Pada Pilkada Jakarta tahun 2017, ketiga kandidat memakai jasa buzzer untuk menggaet pemilih baru sekaligus untuk menjatuhkan pihak lawan. Taktik-taktik yang dipakai pada Pilkada ini adalah menyampaikan kalimat-kalimat tidak pantas seperti cina, kafir, mulut jamban, monyet, dan lain sebagainya. Pada Pilkada Sumatera Utara tahun 2018, buzzer menaikkan narasi pemimpin muslim dan non-muslim untuk masing-masing kandidat.

Kemunculan buzzer dalam dunia perpolitikan juga menunjukkan tren yang selalu naik tiap tahunnya[8]. Hal ini dikarenakan tingginya jumlah bayaran yang diterima buzzer membuat banyak orang yang tertarik untuk menjadi buzzer demi bertahan hidup[7]. Selain itu, tidak adanya penegakan hukum dari aparat terhadap aktivitas buzzer politik di media sosial juga mengakibatkan buzzer dapat menyebarkan informasi yang salah secara bebas tanpa adanya konsekuensi yang berat.

Penelitian yang dilakukan oleh [9] menunjukkan bahwa kita dapat membedakan sebuah hashtag menjadi sebuah hashtag event dan juga hashtag meme menggunakan algoritma random forest dengan *accuracy* sistem yang mencapai 90%. Namun penelitian tersebut tidak membahas sama sekali tentang faktor bot dan buzzer dalam penyebaran informasi hashtag. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [10] menunjukkan bahwa random forest ternyata juga dapat mendeteksi akun penyebar disinformasi pada pemilihan presiden Prancis pada tahun 2017. Penelitian yang dilakukan oleh [11] menunjukkan bahwa kita dapat mendeteksi bot pada twitter dengan melihat bagaimana similaritas tweet yang dihasilkan oleh sebuah akun. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [1] menunjukkan bahwa kita dapat menjaring akun akun buzzer pada sosial media berdasarkan beberapa atribut seperti aktivitas akun dan hashtag postingan akun tersebut.

Berdasarkan riset-riset sebelumnya, dapat dilihat bahwa algoritma random forest dan penggunaan atribut komunitas banyak digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Metode klasifikasi random forest telah digunakan pada penelitian [9][10][1] sedangkan atribut komunitas telah digunakan pada penelitian [9][10].